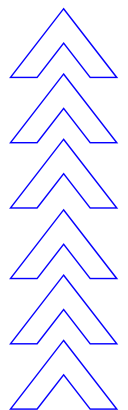




**PEMERINTAH KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
DINAS PERHUBUNGAN**



2023

LKJIP

**Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah**

LKJIP (TAHUN 2023)



DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT. yang telah memberikan kemudahan sehingga dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Perhubungan Tahun 2023 ini dengan tepat waktu. Tanpa pertolongan-Nya tentunya tidak akan sanggup untuk menyelesaikan makalah ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda tercinta kita yaitu Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafa'atnya di akhirat nanti.

Penyusunan LKJIP merupakan amanat pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta disusun berpedoman kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan merupakan laporan tahunan yang dibuat setiap akhir tahun dan sebagai bahan tolok ukur kinerja yang digunakan untuk menilai pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Kuala Tungkal, 24 Februari 2024
**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**



SYAMSUL HARI, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19701223 199203 1 00



IKHTISAR EKSEKUTIF

Dinas Perhubungan dalam pelaksanaan tugas / kegiatan sekarang ini berpedoman kepada Tugas Pokok dan Fungsi yang menjadi wewenang atau yang telah diamanahkan / digariskan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sebagai suatu instansi yang bertugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang Perhubungan, maka Dinas Perhubungan berusaha semaksimal mungkin dalam memberikan Pelayanan atau Pembinaan kepada masyarakat dan meningkatkan kualitas Aparatur serta mendorong terwujudnya capaian kinerja dengan melaksanakan program-program dan kegiatan yang lebih terarah, berdasarkan Renstra 2021 - 2026 dan mengaplikasikannya kepada kegiatan-kegiatan tahunan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintahan, maka dalam rangka pertanggungjawaban kinerja, Dinas Perhubungan dalam pelaksanaan tugas telah menetapkan 7 Indikator Kinerja Sasaran yang menjadi Pedoman dan Pengukuran Kinerja Instansi, yaitu:

1. Persentase Trayek Angkutan Darat Yang Tersedia
2. Jumlah Halte Sungai Yang Tersedia
3. Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal
4. Kapasitas Ruas Jalan Yang Baik
5. Jumlah Sarana dan Prasarana Angkutan Darat dan Laut Yang Tersedia
6. Jumlah Kendaraan Yang Memenuhi Laik Angkutan Jalan
7. Angka Kecelakaan lalu Lintas Darat dan Laut

Secara keseluruhan tingkat capaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dari rata – rata capaian 7 (tujuh) indikator kinerja sasaran tersebut dapat dinyatakan sangat baik dari target yang telah ditetapkan.

Begitu juga bila dilihat dari segi pendanaan, dalam tahun 2023 nilai capaian kinerja Dinas Perhubungan dengan total pagu dana Rp.8.290.200.212,- pada APBD Perubahan, terealisasi sebesar Rp. 7.934.437.954,-, (95,71%) , dengan rincian sebagai berikut:

- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dengan Pagu Anggaran Sebesar Rp. 5,603,132,212,- Terealisasi sebesar Rp. 5,285,775,124 dengan persentase (94.34%).

LKJIP (TAHUN 2023)



DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

- Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) Dengan Pagu Anggaran Sebesar Rp. 1,174,968,000,- Terealisasi sebesar Rp. 1,153,142,430,- dengan persentase (98,14%)
- Program Pengelolaan Pelayaran Dengan Pagu Anggaran Sebesar Rp. 1,512,100,000,- Terealisasi Sebesar Rp. 1,495,520,400,- dengan persentase (98,9%)

Dari seluruh sub kegiatan yang dilaksanakan terdapat 8 sub kegiatan yang realisasinya dibawah 90 % yaitu:

1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.14.900.000,- terealisasi sebesar Rp. 13.100.000 (87,92%). Sisa anggaran sebesar Rp. 1.800.000,- merupakan Efisiensi belanja yang merupakan sisa belanja Belanja cetak atau fotocopy dokumen dokumen perencanaan untuk tahun 2023.

2. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 68.000.000, terealisasi sebesar Rp. 52,818,150 (77,67%). Sisa anggaran sebesar Rp. 15,181,850 merupakan Efisiensi belanja yang merupakan sisa belanja asuransi kendaraan 2023.

3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 469,909,000, terealisasi sebesar Rp. 417,117,749 (88,77%). Sisa anggaran sebesar Rp. 417,117,749 merupakan Merupakan efisiensi dari Belanja Bahan Bahan Bakar dan Pelumas dikarenakan terdapat kerusakan pada salah satu kendaran dinas operasional lapangan.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa Kinerja Dinas Perhubungan dapat dikategorikan sangat baik namun perlu mendapatkan perhatian yang serius untuk masa yang akan datang dalam penyempurnaan- penyempurnaan Kinerja Dinas untuk itu perlu pengembangan dan peningkatan Sumber Daya Manusia maupun pemenuhan kelengkapan sarana dan prasarana penunjang.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif	ii
Daftar Isi	iv
Bab I PENDAHULUAN	1
A GAMBARAN ORGANISASI.....	1
B ASPEK STRATEGIS ORGANISASI	20
C PERMASALAHAN UTAMA	21
Bab II PERENCANAAN KINERJA	23
Bab III AKUNTABILITAS KINERJA	34
A METODE PENGUKURAN CAPAIAN KINEJA	34
B HASIL PERNGUKURAN KINERJA.....	34
C CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	49
Bab IV PENUTUP	69
DAFTAR TABEL.....	v
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Kondisi panjang jalan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat	1
Tabel 1.2	Data Tinggi Wilayah Tiap Kecamatan	2
Tabel 1.3	Jumlah Desa/ Kelurahan	2
Tabel 1.4	Tantangan dan Peluang Dinas Perhubungan	20
Tabel 2.2	Tujuan, Sasaran, dan Target Indikator Kinerja terhadap kondisi akhir renstra	26
Tabel 2.3	Tujuan Dan Sasaran Dinas Perhubungan	32
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja tahun 2023	34
Tabel 3.1	Klasifikasi Penilaian Keberhasilan	37
Tabel 3.2	Pengukuran Kinerja Melalui IKU	39
Tabel 3.3	Hasil Pengukuran Kinerja Melalui IKU.....	24
Tabel 3.4	Hasil Pengukuran Kinerja Melalui Program Kegiatan	55



BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Organisasi

1. Latar Belakang

Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Ibukota Kuala Tungkal terletak di Pantai Timur Provinsi Jambi dengan luas wilayah daratan sekitar 5,009.82 Km² (sekitar $\pm$ 10,56 % dari total luas Provinsi Jambi) dan memiliki luas wilayah perairan/laut 141,75 Km², dengan panjang garis pantai $\pm$ 45 km yang membentang dari utara (Desa Suak Labu) sampai ke selatan (Desa Sungai Dualap). Wilayah ini secara geografis terletak pada posisi 103⁰ 23' sampai dengan 104⁰ 21' Bujur Timur dan 0⁰ 53' sampai dengan 1⁰ 41' Lintang Selatan.

Batas-batas wilayah Kab. Tanjung Jabung Barat sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Riau dan Laut Cina Selatan.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Batang Hari.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Batang Hari dan Kabupaten Tebo.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Selat Berhala.

Kondisi fisik jalan yang dimiliki Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki panjang seluruhnya 2.134,546 km dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 1.1.
Kondisi Panjang Jalan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat

No	Status Jalan	Panjang (km)	Keterangan
1.	Jalan Nasional	174,375	Keputusan Menteri PU Nomor : 631/KPTS/M/2009 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya sebagai Jalan Nasional
2.	Jalan Provinsi	223,770	Keputusan Mendagri dan Otonomi Daerah Nomor 55 Tahun 2000 tentang Penetapan Status Ruas-Ruas Jalan sebagai Jalan Provinsi

LKJIP (TAHUN 2023)



DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

3.	Jalan Kabupaten	1.736,40 1	Tanjung Jabung Barat Dalam Angka Tahun 2011/ 2012
----	-----------------	---------------	---

Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat terletak pada elevasi 3 – 70 meter Diatas Permukaan Laut (DPL). Pada tabel berikut disampaikan elevasi wilayah ibukota kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Tabel 1.2
Data Tinggi Wilayah Ibukota Kecamatan Diatas Permukaan Laut dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat

No	Kecamatan	Ibukota	Tinggi (m)
1.	Tungkal Ulu	Pelabuhan Dagang	35
2.	Merlung	Merlung	45
3.	Batang Asam	Dusun Kebun	35
4.	Tebing Tinggi	Tebing Tinggi	35
5.	Renah Mendaluh	Lubuk Kambing	70
6.	Muara Papalik	Rantau Badak	45
7.	Pengabuan	Teluk Nilau	5
8.	Senyerang	Senyerang	5
9.	Tungkal Ilir	Kuala Tungkal	3
10.	Bram Itam	Bram Itam Kiri	3
11.	Seberang Kota	Tungkal V	3
12.	Betara	Mekar Jaya	3
13.	Kuala Betara	Betara Kiri	3

Sumber : Badan Pertanahan Nasional Kab. Tanjung Jabung Barat

B. Pemerintahan

Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdiri dari 13 kecamatan, dengan jumlah desa/kelurahan tiap-tiap kecamatan dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut :

Tabel 1.3
Jumlah Desa/Kelurahan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan (buah)	Jumlah Desa (buah)
1.	Batang Asam	1	10
2.	Tungkal Ulu	1	9
3.	Tebing Tinggi	1	9
4.	Merlung	1	9

LKJIP (TAHUN 2023)



DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

5.	Renah Mendaluh	1	9
6.	Muara Papalik	1	9
7.	Pengabuan	1	12
8.	Senyerang	1	9
9.	Tungkal Ilir	8	2
10.	Bram Itam	1	9
11.	Seberang Kota	1	7
12.	Betara	1	11
13.	Kuala Betara	1	9
Jumlah		20	114

Sumber : Bagian Pemdes Setda Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Dengan demikian, posisi Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang strategis berada pada jalur perekonomian dan berada pada lintasan pergerakan antar wilayah perairan pada alur pelayaran sungai pengabuan dan alur pelayaran sungai betara, sehingga memberikan peluang untuk membangun aksesibilitas dari desa ke kota yang tinggi bagi lalu lintas barang, orang, dan informasi. Berdasarkan kondisi diatas dipastikan akan menyebabkan tingginya kebutuhan transportasi.

Tantangan dan permasalahan dalam pelayanan sektor transportasi secara umum masih dihadapkan pada peningkatan infrastruktur, kelancaran dan keselamatan mobilitas angkutan Darat, dann Laut, serta aksesibilitas pelayanan terutama pada pelayanan jasa transportasi di wilayah terpencil dan perbatasan yang belum seluruhnya dapat dijangkau secara memadai.

Terbatasnya pendanaan pemerintah daerah untuk pengadaan fasilitas baru seperti halte sungai, serta pemeliharaan dan rehabilitasi prasarana dan sarana transportasi yang telah ada, tingkat ketersediaan armada angkutan yang masih sangat terbatas dalam mengakomodasi pergerakan barang dan penumpang khususnya pada wilayah-wilayah terpencil, menjadi salah satu faktor yang membuat masyarakat terpencil kurang dapat berkembang.

Pembangunan pada sektor perhubungan sangat berpengaruh besar terhadap perekonomian di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, mengingat kegiatan dibidang transportasi berperan penting dalam kegiatan distribusi

LKJIP (TAHUN 2023)



DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

barang dan jasa ke seluruh pelosok daerah, oleh karena itu pembangunan infrastruktur merupakan salah satu prioritas sasaran Dinas Perhubungan Kab. Tanjung Jabung Barat sejalan dengan arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam kurun waktu 2021-2026 yaitu dengan mengupayakan tersedianya infrastruktur melalui pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi yang berkelanjutan, guna mendorong pemerataan pembangunan, melayani kebutuhan masyarakat dengan harga terjangkau serta membuka keterisolasian wilayah tertinggal, pedalaman maupun perbatasan.

Dalam rangka mencapai target – target Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tersebut Dinas Perhubungan merupakan salah satu Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat di Bidang Perhubungan yang bertanggung jawab kepada Bupati Tanjung Jabung Barat melalui Sekretaris Daerah, dimana tugas pokok Dinas Perhubungan yaitu melaksanakan urusan Pemerintah Daerah bidang Perhubungan.

Kemudian sebagai bentuk pertanggungjawaban, dimana salah satu prinsip tata pemerintahan yang baik adalah akuntabilitas, sebagai wujud komitmen organisasi penyelenggara Negara dalam mempertanggung jawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan pada setiap akhir tahun.

Oleh karena itu melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) adalah salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam mewujudkan Good Governance di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang perhubungan.

LKJIP (TAHUN 2023)



DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

A. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 529, Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan serta bidang prasarana dan keselamatan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan serta bidang prasarana dan keselamatan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan serta bidang prasarana dan keselamatan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang lalu lintas dan angkutan serta bidang prasarana dan keselamatan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdiri dari :

- a. Sekretariat terdiri atas
 1. Subbagian Umum dan Keuangan; dan
 2. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program.
- b. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan terdiri atas:
 1. Seksi Lalu Lintas;
 2. Seksi Angkutan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Bidang Prasarana dan Keselamatan terdiri atas:
 1. Seksi Prasarana;
 2. Seksi Keselamatan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Unit Pelaksana Teknis.

LKJIP (TAHUN 2023)



DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

GAMBAR STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT





B. Uraian Tugas

Dinas Perhubungan adalah unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Perhubungan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Selanjutnya tugas pokok dan rincin tugas dari masingmasing jabatan sebagaimana tersebut di atas ditaur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 63 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, sebagai berikut:

1) SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan dinas perhubungan. Dalam melaksanakan tugas, sekretariat memiliki fungsi :

- a. Koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan;
- b. Pembinaan dan penyelenggaraan urusan umum dan keuangan meliputi : ketatausahaan, kepegawaian, penatausahaan asset dan perlengkapan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi dan tindak lanjut LHP;
- c. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang – undangan;
- d. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2) SUBBAGIAN UMUM DAN KEUANGAN

Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, ketatausahaan, penatausahaan asset, kerja sama, kehumasan, ketatalaksanaan, dan keuangan.

Dalam melaksanakan tugas Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai fungsi :

LKJIP (TAHUN 2023)



DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

- a. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup umum dan keuangan;
 - b. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi, promosi, kesepakatan, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai;
 - c. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis pengelolaan ketatausahaan yang meliputi pengelolaan administrasi surat menyurat, tata naskah dinas, dan penataan kearsipan;
 - d. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi keuangan yang meliputi kegiatan pengelolaan dan penendalian keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan (LHP);
 - e. Melakukan pengelolaan dan penyusunan laporan administrasi kepegawaian, ketatausahaan, peraturan perundang – undangan, tata laksana dan hubungan masyarakat;
 - f. Melakukan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan urusan gaji pegawai, pengendalian keuangan, pengujian dan penebitan surat perintah membayar (SPM), perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, tindak lanjut LHP serta penyusunan Laporan Keuangan
 - g. Melakukan pemeliharaan dan pengelolaan asset dan perlengkapan, pengelolaan inventaris barang milik negara dan penyusunan laporan asset;
 - h. Melakukan penyiapan bahan evaluasi dan laporan administrasi keuangan;
 - i. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/intansi terkait sesuai lingkup tugas; dan
 - j. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.
- 3) SUBBAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PROGRAM

LKJIP (TAHUN 2023)



DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, evaluasi dan pelaporan program. Dalam melaksanakan tugasnya, subbagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan program memiliki fungsi :

- a. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup perencanaan, evaluasi dan pelaporan program;
- b. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, koordinasi penyusunan program dan anggaran;
- c. Melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan dari bidang – bidang untuk bahan rumusan kebijakan teknis dan operasional rencana kerja;
- d. Melakukan penghimpunan, pengolahan dan penyiapan bahan evaluasi dan penilaian kinerja;
- e. Melakukan penyiapan bahan koordinasi perencanaan dan anggaran meliputi anggaran APBD, APBN, PHLN baik kabupaten, provinsi dan pusat secara lintas program;
- f. Melakukan penyusunan Laporan Kinerja (LKJ), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU_ dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD); dan
- g. Melakukan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

4) BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN

Bidang perhubungan darat memiliki tugas merumuskan kebijakan, melaksanakan kebijakan, menyusun norma, standar, dan prosedur, bimbingan teknis dan supervise, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, prasarana, system lalu lintas dan angkutan jalan, serta keselamatan transportasi di bidang perhubungan darat.

Dalam melaksanakan tugasnya bidang perhubungan darat memiliki fungsi :

LKJIP (TAHUN 2023)



DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

- a. penyusunan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja di bidang lalu lintas, angkutan dan pengujian sarana;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang lalu lintas, angkutan dan pengujian sarana;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas, angkutan dan pengujian sarana;
- d. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas, angkutan dan pengujian sarana; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5) Seksi Lalu Lintas

Seksi Lalu Lintas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan di bidang lalu lintas. Seksi Lalu Lintas mempunyai uraian tugas pekerjaan:

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- b. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penetapan rencana induk jaringan LLAJ Daerah;
- c. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal dalam Daerah yang terletak pada jaringan jalan Daerah dan/atau jaringan jalur kereta api Daerah;
- d. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam Daerah;
- e. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penetapan rencana induk perkeretaapian Daerah;



- f. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penetapan jaringan jalur kereta api dalam Daerah;
- g. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian pada jaringan jalur perkeretaapian Daerah;
- h. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyediaan perlengkapan jalan di jalan Daerah;
- i. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pelaksanaan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Daerah;
- j. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan Daerah;
- k. melakukan monitoring, evaluasi, pelaporan serta pendokumentasian pelaksanaan kegiatan seksi; dan
- l. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

6) Seksi Angkutan

Seksi Angkutan melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan di bidang angkutan. Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Angkutan mempunyai uraian tugas pekerjaan:

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- b. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam Daerah;
- c. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam Daerah;

LKJIP (TAHUN 2023)



DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

- d. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam Daerah;
- e. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penetapan rencana umum jaringan trayek perdesaan dalam Daerah;
- f. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan dalam Daerah;
- g. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam Daerah serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam Daerah;
- h. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam Daerah dan beroperasi pada lintas pelabuhan di Daerah;
- i. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam Daerah;
- j. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penerbitan trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek dalam Daerah;
- k. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam Daerah;
- l. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penerbitan izin operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas dalam Daerah;



- m. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam Daerah;
- n. kebijakan penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam Daerah
- o. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungao dan danau sesuai dengan domisili orang perorangan warga negara atau badan usaha;
- p. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai domisili badan usaha;
- q. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penerbitan izin pengadaan atau pembangunan perkerataapian khusus, izin operasi, dan penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya dalam Daerah;
- r. melakukan monitoring, evaluasi, pelaporan serta pendokumentasian pelaksanaan kegiatan seksi; dan
- s. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

7) BIDANG PRASARANA DAN KESELAMATAN JALAN

Bidang Prasarana dan Keselamatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana, keselamatan, dan pengembangan transportasi. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Prasarana dan Keselamatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja di bidang lalu lintas, angkutan dan pengujian sarana;



- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang prasarana, keselamatan, dan pengembangan transportasi;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang prasarana, keselamatan, dan pengembangan transportasi;
- d. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana, keselamatan, dan pengembangan transportasi; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja di bidang lalu lintas, angkutan dan pengujian sarana;
- f. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang prasarana, keselamatan, dan pengembangan transportasi;
- g. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang prasarana, keselamatan, dan pengembangan transportasi;
- h. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana, keselamatan, dan pengembangan transportasi; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8) Seksi Prasarana

Seksi Prasarana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan di bidang prasarana. Dalam melaksanakan nya, Seksi Prasarana mempunyai uraian tugas pekerjaan:

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- b. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan terminal penumpang tipe C;
- c. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir;

LKJIP (TAHUN 2023)



DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

- d. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal;
- e. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP untuk pelabuhan sungai dan danau;
- f. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan dan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal;
- g. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan dan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau;
- h. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpul lokal;
- i. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penerbitan izin pembangunan pelabuhan untuk berlabuh;
- j. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan penunjam lokal;
- k. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penerbitan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal;
- l. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penerbitan izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal;
- m. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penerbitan izin pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal

LKJIP (TAHUN 2023)



DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

- n. kebijakan penerbitan izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter;
- o. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penerbitan izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkerataapian umum yang jaringan jalurnya dalam Daerah;
- p. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api dalam Daerah;
- q. melakukan monitoring, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian pelaksanaan kegiatan seksi; dan
- r. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

9) Seksi Keselamatan

Seksi Keselamatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan di bidang keselamatan. Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Keselamatan mempunyai uraian tugas pekerjaan:

- a. Amelakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- b. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas di jalan Daerah;
- c. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan laik fungsi jalan keselamatan sarana dan prasarana;
- d. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan fasilitasi manajemen dan penanganan keselamatan di jalan Daerah;

LKJIP (TAHUN 2023)



DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

- e. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan fasilitasi promosi dan kemitraan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan; keselamatan perusahaan angkutan umum;
- f. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan fasilitasi kelaikan kendaraan;
- g. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penegakan hukum oleh PPNS di bidang lalu lintas dan angkutan jalan
- h. melakukan monitoring, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian pelaksanaan kegiatan seksi; dan
- i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;

3. Sumber Daya Manusia

Guna mendukung dan menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dimilikinya Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat didukung oleh sumber daya manusia yang terdiri atas PNS, TKS dan TKK yang terdiri dari 31 (Tiga Puluh Satu) PNS dan 90 (Sembilan Puluh) TKK.

Jika ditinjau dari kepegawaian dan tingkat pendidikan, komposisi sumber daya manusia pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1 SDM Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

No	Uraian	Jumlah	Pria	Wanita
1	Jumlah Pegawai			
	berdasarkan Eselon :	1	1	-
	- Eselon II	3	3	-
	- Eselon III	11	10	1
	- Eselon IV	16	13	3
	-Non Eselon	31	7	4
	Jumlah			

LKJIP (TAHUN 2023)



DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

2	Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan :			
	- SD	1	1	0
	- SMP	1	1	0
	- SMA	12	11	1
	- D II	1	1	0
	- D III	2	1	1
	- D IV	0	0	0
	- S.1	12	10	2
	- S.2	2	2	0
	Jumlah	31	27	4
3	Jumlah Pegawai berdasarkan Status :			
	- PNS	31	27	4
	- Kontrak	90	81	9
4	Pendidikan Perjenjangan Aparatur :			
	- Diklat PIM II	0	0	0
	- Diklat PIM III	1	1	0
	- Diklat PIM IV	3	3	0

Sumber Daya lainnya seperti peralatan, perlengkapan baik berupa aset bergerak maupun tidak bergerak. Adapun aset yang mendukung kegiatan pelayanan dan operasional pada yang ada Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2

Aset Pendukung Kegiatan Pelayanan Dan Operasional Pada Dinas Perhubungan Kab. Tanjung Jabung Barat

No	Jenis Asset	Jumlah	Ket
1.	Prasarana		

LKJIP (TAHUN 2023)



DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

	a. Gedung kantor Dishub	1 unit	
	b. Gedung hanggar bongkar muat barang	1 unit	
	c. Terminal Kota	2 unit	
	d. Gedung UPT Sarana dan Prasarana	1 unit	
	e. Gedung Pos pengujian kendaraan bermotor	1 unit	
	f. Pos pengawasan di dermaga	1 unit	
	- Dermaga LLASDP	1 unit	
	- Dermaga tangga raja ulu	1 unit	
	- Dermaga ampera	1 unit	
	- Dermaga kuatik	18 unit	
	g. Halte sungai		
2.	Sarana	1 unit	
	a. Kendaraan operasional kepala dinas	2 unit	
	b. Kendaraan operasional LLAJ	3 unit	
	c. Kendaraan operasional bus sekolah	21 unit	
	f. Kendaraan operasional dinas roda dua	1 unit	
	g. Kendaraan operasional roda tiga	1 unit	
	g. Kendaraan operasional air (speedboat)		
3.	Fasilitas Keselamatan Transportasi		
	a. Rambu darat	433 unit	
	b. Rambu type F	8 unit	
	c. Rambu Mini	15 unit	
	d. RPJJ (Rambu petunjuk jalan darat)	17 unit	
	e. Pagar temporer	39 unit	
	f. Warning light	12 unit	
	h. Traffic light	2 unit	
	i. Guadrail	1 paket	
	j. Median	1 paket	
	k. Rambu sungai	30 nit	



B. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Transportasi memiliki peran penting dan strategis dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi dan menunjang pengembangan wilayah di kabupaten Tanjung Jabung Barat. Namun demikian masih terdapat berbagai permasalahan di sektor perhubungan diantaranya:

- a) Belum baiknya tingkat pelayanan terminal penumpang utamanya tipe c dari aspek jumlah, persebaran dan kondisi fisik fasilitas utama beserta pendukungnya;
- b) Pengembangan jaringan konektivitas yang bersentuhan dengan pelayanan angkutan darat dan laut belum optimal dalam mendukung aksesibilitas dan aglomerasi wilayah perkotaan, kawasan perbatasan dan kawasan strategis lainnya;
- c) Masih tingginya angka kecelakaan yang terjadi di Jalan Raya dan ruas jalan lainnya mengakibatkan belum tercapainya target penurunan kecelakaan
- d) Masih Rendahnya Kualitas dan kuantitas sarana dan Prasarana Perhubungan

Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat diperoleh melalui analisis Renstra Kementerian Perhubungan dan Analisis telaahan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW)

Tabel I. 4 Tantangan dan Peluang Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

No.	Kondisi Existing	Tantangan	Peluang	Arah Pengembangan pelayanan
1	Belum optimalnya pelabuhan Penyeberangan yang ada untuk melayani pergerakan orang dan barang antar pulau dalam wilayah Kabupaten	Keterbatasan penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung konektivitas antar Desa dan Ke Kota	Penyediaan Halte sungai sebagai program prioritas perhubungan yang berkaitan dengan pemenuhan Visi dan Misi Bupati Tanjung Jabung Barat	Sistem jaringan transportasi darat meliputi jaringan angkutan sungai danau dan penyeberangan (memantapkan lintas penyeberangan antar Desa ke

LKJIP (TAHUN 2023)



DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

	Tanjung Jabung Barat (konektivitas antar Desa dan Ke Kota)			Kota, dan pengembangan dermaga penyeberangan)
2	Belum terpenuhinya kebutuhan pelayanan di berbagai moda transportasi	Belum selarasnya antara kebutuhan dan Penyediaan sarana Prasarana transportasi	1. Tersedianya dokumen kajian terhadap kebutuhan pelayanan transportasi 2. Penguatan sarana dan prasarana keselamatan transportasi	Sistem jaringan transportasi darat meliputi jaringan trayek angkutan jalan (pembangunan jaringan jalan bebas hambatan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan
3	Penurunan Level of Service (LoS) jalan yang ditandai peningkatan rasio volume dibandingkan kapasitas jalan salah satunya disebabkan meningkatnya kepemilikan kendaraan bermotor pribadi angkutan jalan	Peningkatan volume lalu lintas di bandingkan kapasitas jalan yang tersedia	1. Terselenggaranya Pengawasan dan Pengendalian Operasional Lalu Lintas Jalan 2. Terlaksananya Pemasangan dan Pemeliharaan Fasilitas Keselamatan Jalan 3. Terselenggaranya Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Pada Ruas Jalan Kabupaten	Pemenuhan sarana dan prasarana lalu lintas jalan dalam rangka Peningkatan Level Of Service (LOS) jalan
4	Masih kurangnya pendidikan dan pelatihan teknis Perhubungan untuk meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Perhubungan	Masih rendahnya kesempatan untuk mengikuti Pendidikan dan pelatihan teknis untuk meningkatkan kompetensi SDM Perhubungan	Kewenangan pengawasan dan pengendalian lalu lintas angkutan jalan memerlukan tenaga SDM penegak hukum bidang perhubungan (PPNS)	Dengan peningkatan kompetensi SDM Perhubungan dapat mewujudkan pelayanan transportasi yang optimal

C. PERMASLAHAN UTAMA (ISU STRATEGIS)

Isu strategis adalah kebijakan fundamental atau perhatian program yang menentukan situasi yang sangat penting, dan pilihan-pilihan yang

LKJIP (TAHUN 2023)



DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

dihadapi Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada waktu sekarang dan di masa depan. Isu-isu kritikal yang mencerminkan persoalan-persoalan yang berkepanjangan yang dihadapi oleh Sektor Perhubungan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat atau kegiatan-kegiatan sekarang yang diantisipasi mempunyai dampak yang sangat nyata terhadap kinerja Sektor Perhubungan.

Berbagai permasalahan pembangunan bidang perhubungan yang dihadapi, tantangan dan potensi yang dapat dikembangkan, mendasari perumusan isu strategis pembangunan bidang perhubungan. Perumusan dilaksanakan dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat ditinjau dari gambaran pelayanan, visi misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian Perhubungan, sasaran jangka menengah dari Renstra Dinas Perhubungan, implikasi RTRW dan KLHS bagi pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kemudian berdasarkan hasil analisis tim penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maka ditetapkanlah Isu Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yaitu:

1. Kesenjangan yang makin besar antara perkembangan kebutuhan dan aktivitas masyarakat Kota Tasikmalaya dengan sarana prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang tersedia;
2. Manajemen rekayasa lalu lintas, manajemen angkutan dan pengendalian lalu lintas belum optimal.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar Pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan antara Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Bupati Tanjung Jabung Barat yang harus dipenuhi sepanjang tahun 2023. Perjanjian Kinerja disesuaikan dengan susunan agenda, prioritas, sasaran pembangunan pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 serta Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2021 – 2026.

RPJMD KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT Tahun 2021-2026

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026, Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah:

“Menuju Kabupaten Tanjung Jabung Barat BERKAH (Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman dan Harmonis)”

Upaya yang dilaksanakan untuk dapat mewujudkan visi pembangunan daerah tersebut adalah dengan menetapkan beberapa misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026, dimana untuk Dinas Perhubungan mendukung pencapaian Misi 5, Dengan Tujuan 5.1 yaitu Mengurangi kesenjangan pembangunan desa dan kota/kabupaten. Dan Sasaran 5.1.2 Menguatnya konektivitas dari desa sampai kota dan daerah perbatasan

Tabel 2. 1 Visi dan Misi Bupati Tanjung Jabung Barat

Visi RPJMD	“Menuju Kabupaten Tanjung Jabung Barat BERKAH (Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman dan Harmonis)”
Misi RPJMD :	

LKJIP (TAHUN 2023)



DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

Misi 1	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang beriman, berilmu, dan berahlak
Misi 2	Cipta kondisi sosial yang tentram, tertib, dan harmonis
Misi 3	Peningkatan tata kelola pemerintah yang baik
Misi 4	Peningkatan aktivitas perekonomian daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan
Misi 5	Pemerataan pembangunan daerah dari desa sampai ke kota

LKJIP (TAHUN 2023)



DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Untuk mendukung dan mencapai tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam **misi ke-5** , strategi dan arah kebijakan yang dilakukan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam lima tahun mendatang adalah dengan menetapkan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut:

Visi RPJMD : Menuju Kabupaten Tanjung Jabung Barat BERKAH (Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman dan Harmonis)

MISI RPJMD

- **Misi 5 : Pemerataan Pembangunan Daerah dari Desa Samapi Ke Kota**

Tujuan 5.1 : Mengurangi Kesenjangan Pembangunan Desa dan Kota

Strategi RPJMD :

- Pembangunan jalan dan jembatan aksesibilitas (konektivitas)
- Pembangunan jalan dan jembatan aksesibilitas (konektivitas) Pembangunan dan peningkatan jaringan transportasi, terminal, dan pelabuhan, serta Pelabuhan Sungai dan Danau (Halte Sungai)

Kebijakan RPJMD :

- Peningkatan aktivitas perekonomian yang merata dari desa sampai kota yang lebih ditopang dari sektor ekonomi kerakyatan

LKJIP (TAHUN 2023)



DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

Tabel 2.2 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Analisis Capaian Tujuan		
			Strategi	Arah Kebijakan	Program
1. Terwujudnya Konektivitas dan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan, Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan	1.1. Meningkatnya Aksesibilitas Masyarakat Melalui Ketersediaan Sarana Dan Prasana Taransportasi Darat Dan Laut	1.1.1. Persentase Trayek Angkutan Darat Yang Tersedia	Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap sarana prasarana transportasi darat dan laut yang diarahkan melalui peningkatan kinerja pelayanan angkutan agar dapat mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, industri dan pariwisata.	Mendukung pergerakan kelancaran mobilitas penumpang dan distribusi barang / jasa untuk mendorong pengembangan konektivitas antar wilayah dan meningkatkan daya saing produk lokal;	Program Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
		1.1.2. Jumlah Halte Sungai Yang Tersedia			Program Pengelolaan Pelayaran
		1.1.3. Persentase Armada Angkutan Darat dan Laut Yang Tersedia		Penyelenggaraan angkutan massal	Program lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
		1.1.4. Kapasitas Ruas Jalan Yang Baik		Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan kapasitas ruas jalan yang terpadu dengan tata ruang wilayah, sesuai dengan standar angkutan jalan.	Program lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
	Meningkatnya Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Darat dan Laut	1.1.5. Jumlah Sarana dan Prasarana Angkutan Darat dan Laut Yang Tersedia	Meningkatkan kualitas dan kuantitas fasilitas dan layanan bidang perhubungan untuk menciptakan keamanan, ketertiban, kelancaran dan keselamatan sehingga dapat	Pemenuhan dan pemeliharaan kondisi sarana prasarana LLAJ	Program lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

LKJIP (TAHUN 2023)



DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

			mengurangi angka kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kondisi sarana prasarana kelengkapan jalan dan faktor teknis kendaraan.		
		1.1.6. Jumlah Kendaraan Yang Memenuhi Laik Angkutan Jalan	Meningkatkan kualitas pengujian kendaraan bermotor secara berkala .	Penetapan kondisi laik jalan angkutan untuk menunjang ketertiban, kelancaran, keamanan dan kenyamanan berlalu lintas.	Program lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
		1.1.7. Prediksi Menurunnya Jumlah Angka Kecelakaan Darat dan Laut	Melakukan intensifikasi kegiatan gakum dan manajemen rekayasa lalu lintas guna menurunkan tingkat kecelakaan pasda sector darat dan laut.	Peningkatan efektivitas pengawasan terhadap pemenuhan standar keselamatan dan keamanan transportasi.	Program lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) & Program Pengelolaan Pelayaran
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	2.1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja, dan Keuangan	2.1.1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).	Peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat melalui media teknologi informasi menuju e-government. Pemerintahan.	Menjamin adanya pemeliharaan serta tersedianya administrasi perkantoran dan sarana prasarana penunjang penyelenggaraan pemerintahan	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		2.1.2. Nilai AKIP	Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi (TI) dan melakukan review kinerja dalam pelaksanaan tata	Meningkatkan pengembangan dan pemanfaatan aplikasi berbasis teknologi dan informasi.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

LKJIP (TAHUN 2023)



DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

			kelola/administrasi/manajemen pemerintahan		
		2.1.3. Menurunnya Jumlah Temuan Administrasi dan Keuangan	Meningkatkan kualitas dan keprofesionalan aparat Dinas Perhubungan melalui peningkatan kualifikasi pendidikan dan pelatihan.	Peningkatan kualitas dan kapasitas penyelenggaraan pelayanan transportasi melalui peningkatan pendidikan SDM Perhubungan.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

LKJIP (TAHUN 2023)



DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2021 - 2026

Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Untuk mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran Kepala Daerah, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat menetapkan visi, yaitu:

“Terwujudnya Pelayanan Transportasi yang Handal dan Terpadu”

Upaya untuk mewujudkan Visi tersebut adalah melalui 2 Misi, yaitu:

1. Meningkatkan Pembangunan dan mengoptimalkan Sarana Prasarana Transportasi yang Berkelanjutan.
2. Mewujudkan Keamanan, Keselamatan dan Kenyamanan Transportasi dengan cara meningkatkan Pelayanan, Fungsi Forum Koordinasi Lalu Lintas Angkutan & Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Transportasi.

Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran

Rencana Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat secara lengkap termuat dalam Rencana Strategis (Renstra) yang disusun melalui suatu proses yang berorientasi pada hasil yang dicapai selama kurun waktu 5 tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan mempertimbangkan potensi, peluang, tantangan, dan hambatan yang memuat visi, misi, sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan serta indikator keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya secara ringkas, Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2021-2026 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.3 Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Tujuan Organisasi	Indikator Kinerja Tujuan
Terwujudnya Konektivitas dan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan, Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan	• Rasio Konektivitas • Rasio Angka Kecelakaan Lalu Lintas
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	• Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) • Nilai AKIP OPD • Menurunnya Jumlah Temuan Administrasi dan Keuangan



Berdasarkan tujuan tersebut, selanjutnya Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat menjabarkannya dalam 2 (dua) sasaran strategis yang akan dicapai secara tahunan selama periode Renstra. Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat juga telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi.

Sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis selama periode tahun 2021 - 2026 dapat disajikan pada tabel berikut:

LKJIP (TAHUN 2023)



DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi Awal 2021	Target Kinerja Sasaran					Kondisi Akhir RENSTRA
				2022	2023	2024	2025	2026	
3. Terwujudnya Konektivitas dan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan, Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan	2.1. Meningkatnya Akseibilitas Masyarakat Melalui Ketersediaan Sarana Dan Prasana Taransportasi Darat Dan Laut	2.1.1. Persentase Trayek Angkutan Darat Yang Tersedia	40%	45%	50%	55%	60%	65%	65%
		3.1.2. Jumlah Halte Sungai Yang Tersedia	1 Unit	1 unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	6 Unit
		3.1.3. Persentase Armada Angkutan Darat dan Laut Yang Tersedia	40%	45%	50%	55%	60%	65%	65%
		3.1.4. Kapasitas Ruas Jalan Yang Baik	B	B	A	A	A	A	A
	3.2. Meningkatnya Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Darat dan Laut	1.2.1. Jumlah Sarana dan Prasarana Angkutan Darat dan Laut Yang Tersedua	30 Unit	35 Unit	40 Unit	45 Unit	50 Unit	55 Unit	255 Unit
		1.2.2. Jumlah Kendaraan Yang Memenuhi Laik Angkutan Jalan	1150 Unit	1170 Unit	1180 Unit	1210 Unit	1300 Unit	1350 Unit	1350 Unit
		1.2.3. Prediksi Menurunnya Jumlah Angka Kecelakaan Darat dan Laut	50 Kasus	40 Kasus	30 Kasus	20 Kasus	10 Kasus	5 Kasus	5 Kasus

LKJIP (TAHUN 2023)



DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	2.2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja, dan Keuangan	2.1.2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).	70	70	78	80	80	85	85 (A)
		2.1.3. Nilai AKIP	CC	CC	B	B	BB	BB	BB
		2.1.4. Menurunnya Jumlah Temuan Administrasi dan Keuangan	0 Temuan	0	0	0	0	0	0 Temuan

Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 adalah rencana pencapaian target yang menjadi sasaran bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan pembangunan Perhubungan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam kurun waktu 5 tahun dan tahun 2023 adalah tahun awal untuk Renstra Dinas Perhubungan periode tahun 2021-2026, dikarenakan untuk tahun 2021 merupakan bagian dari Renstra Dinas Perhubungan 2016 – 2021 dan merupakan tahun dasar (Kondisi Awal) terhadap target pada Tahun 2022.

PERJANJIAN KINERJA
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

OPD : DINAS PERHUBUNGAN
TAHUN : 2023

Tabel 2. 4 Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2023
1.1. Meningkatnya Akseibilitas Masyarakat Melalui Ketersediaan Sarana Dan Prasana Taransportasi Darat Dan Laut	1.1.1. Persentase Trayek Angkutan Darat Yang Tersedia	50%
	1.1.2. Jumlah Halte Sungai Yang Tersedia	1 Unit
	1.1.3. Persentase Armada Angkutan Darat dan Laut Yang Tersedia	50%
	1.1.4.Kapasitas Ruas Jalan Yang Baik	60%
1.2. Meningkatnya Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Darat dan Laut	1.2.1.Jumlah Sarana dan Prasarana Angkutan Darat dan Laut Yang Tersedua	40 Unit
	1.2.2.Jumlah Kendaraan Yang Memenuhi Laik Angkutan Jalan	1180 Unit
	1.2.3.Prediksi Menurunnya Jumlah Angka Kecelakaan Darat dan Laut	30 Kasus

No	Program	Anggaran	Ket
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 4,370,704,169,-	APBD
2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan	Rp. 1,053,968,000,-	APBD
3	Program Penyelenggaran Pengelolaan Pelayaran	Rp. 1,098,100,000,-	APBD
Jumlah		Rp. 6,522,772,169,-	APBD

Setelah Anggaran 2022 dilaksanakan, dan dalam rangka menindaklanjuti arahan dan masukan kegiatan pembinaan dan Pendampingan SAKIP oleh Kementerian PAN dan RB (Ibu Ummu Nur Hanifah dan Ibu Nararia Hastutiningtyas) tanggal 22 s/d 23 Juni 2024 Bertempat di Hotel Urban 101 Thamrin Jakarta, Dinas Perhubungan Sumatera Barat melakukan perubahan meliputi:

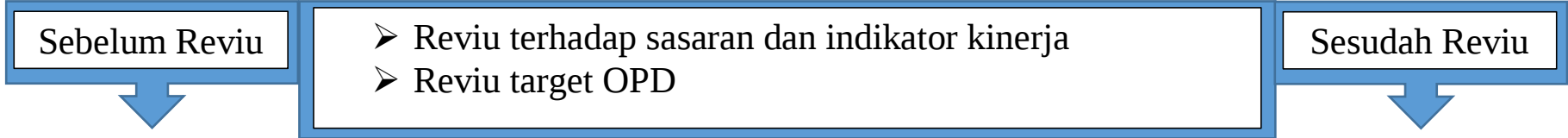
1. Penyempurnaan atau merubah sasaran dan indikator terkait kinerja internal organisasi yang dinilai lebih tepat sasaran

Tabel II. 6 saran evaluator Kementerian PAN dan RB pada evaluasi SAKIP dan RB tanggal 22 s/d 23 Juni 2024 , dapat dilihat di bawah ini :

LKJIP (TAHUN 2023)



DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	1.1. Meningkatnya Konektivitas dan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan, Angkutan Sungai dan Angkutan Penyeberangan	1.1.1. Indeks Konektivitas Jaringan Jalan	50%
		1.1.2. Indeks Konektivitas Pedesaan	60%
		1.1.3. Persentase Menurunnya Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas Darat	30 %
		1.1.4. Persentase Prasaranan Lalu Lintas Angkutan Jalan, Angkutan Sungai dan Angkutan Penyeberangan Yang Tersedia Berbanding Dengan Kebutuhan	70%

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2023
1.1. Meningkatnya Akseibilitas Masyarakat Melalui Ketersediaan Sarana Dan Prasana Taransportasi Darat Dan Laut	1.1.1. Persentase Trayek Angkutan Darat Yang Tersedia	50%
	1.1.2. Jumlah Halte Sungai Yang Tersedia	1 Unit
	1.1.3. Persentase Armada Angkutan Darat dan Laut Yang Tersedia	50%
	1.1.4. Kapasitas Ruas Jalan Yang Baik	60%
1.2. Meningkatnya Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Darat dan Laut	1.2.1. Jumlah Sarana dan Prasarana Angkutan Darat dan Laut Yang Tersedua	40 Unit
	1.2.2. Jumlah Kendaraan Yang Memenuhi Laik Angkutan Jalan	1180 Unit
	1.2.3. Angka Kecelakaan Lalu Lintas Darat dan Laut	30 Kasus

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja

Akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban dari instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Pengukuran kinerja dilakukan untuk mengetahui selisih atau celah kinerja (performance gap), berdasarkan hasil pengukuran kinerja dilakukan analisis dan evaluasi baik terhadap kinerja maupun terhadap penggunaan sumber daya untuk menetapkan strategi yang tepat dalam peningkatan kinerja dimasa yang akan datang (performance improvement). Laporan Kinerja Tahunan merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Sebagai informasi tambahan Metodologi pengukuran kinerja yang digunakan adalah metode pengukuran sederhana dengan cara melakukan perbandingan antara target rencana kinerja dengan realisasi kinerja yang telah dicapai. Pengukuran kinerja Dinas Perhubungan Kabaupaten Tanjung Jabung Barat meliputi pencapaian target indikator kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahunan.

Tabel 3. 1 Klasifikasi Penilaian Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2023

No.	Klasifikasi	Predikat
1	85% - 100%	Sangat Baik
2	69% - 84%	Baik
3	53%-68%	Cukup
4	<53%	Kurang

B. Hasil Pengukuran Kinerja

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintahan, maka dalam rangka pertanggungjawaban kinerja, Dinas Perhubungan dalam pelaksanaan tugas telah menetapkan 7 Indikator Kinerja Sasaran yang menjadi Pedoman dan Pengukuran Kinerja Instansi, yaitu:

1. Persentase Trayek Angkutan Darat Yang Tersedia
2. Jumlah Halte Sungai Yang Tersedia4) Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD
3. Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal
4. Kapasitas Ruas Jalan Yang Baik

LKJIP (TAHUN 2023)



- 5. Jumlah Sarana dan Prasarana Angkutan Darat dan Laut Yang Tersedia
- 6. Jumlah Kendaraan Yang Memenuhi Laik Angkutan Jalan
- 7. Angka Kecelakaan lalu Lintas Darat dan LautAngka Kecelakaan lalu Lintas Darat dan Laut



Tabel III. 2 PENGUKURAN KINERJA MELALUI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2021 s/d 2023 DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Formulasi	Realisasi		Tahun 2023			Sumber Data	KET
			2021	2022	Target	Realisasi	Capaian %		
1.1. Meningkatnya Aksebilitas Masyarakat Melalui Ketersediaan Sarana Dan Prasana Taransportasi Darat Dan Laut	1.1.1. Persentase Trayek Angkutan Darat Yang Tersedia	Rumus Indikator : $\frac{\text{Jumlah Jaringan Trayek Yang Terseida} \times 100\%}{\text{Jumlah Jaringan Trayek Yang Dibutuhkan}}$	50%	0%	50%	0%	0%	Dishub	
	1.1.2. Jumlah Halte Sungai Yang Tersedia	Jumlah Halte Sungai Yang Sudah Dibangun	2 Unit	3 Unit	1 Unit	0	3 Unit	Dishub	
	1.1.3. Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal pertahun	Jumlah orang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun	1.9230 Orang	291.098 Orang	194.000 Orang	215.696 Orang	111%	Dishub	
		Jumlah barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun	6.158 Ton	2.544 Ton	6.300 Ton	12422 Ton	197%	Dishub	
	1.1.4. Kapasitas Ruas Jalan Yang Baik	V/c	0,35 (A)	0,20 (A)	C	C (0,45)	Arus Lalu Lintas Stabil Kecepatan dikendalikan	Dishub	
1.2. Meningkatnya Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Darat dan Laut	1.2.1. Jumlah Sarana dan Prasarana Angkutan Darat dan Laut Yang Tersedua	Jumlah Fasilitas Keselamatan/Rambu lalu Lintas Yang Terpasang Pada Titik Rawan Kecelakaan Tahun-n	17 Unit	8 Unit	40 unit	20 Unit	50%	Dishub	
	1.2.2. Jumlah Kendaraan Yang Memenuhi Laik Angkutan Jalan	Jumlah Kendaraan Yang Lulus Uji Elektronik	0 Unit	0 Unit	1180 Unit	1755 Unit	148%	Dishub	
	1.2.3. Angka Kecelakaan lalu Lintas Darat dan Laut	Jumlah Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Darat dan Laut	66 Kasus	65 Kasus	30 Kasus	20 Kasus	150%	Dishub	

Secara keseluruhan tingkat capaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dari rata – rata capaian 7 (tujuh) indikator kinerja sasaran tersebut dapat dinyatakan sangat baik dari target yang telah ditetapkan.

C. Capain Kinerja Organisasi

Akuntabilitas adalah suatu wujud pertanggungjawaban dari suatu Instansi Pemerintah atas kegiatan yang telah dilaksanakan dalam waktu satu tahun yang disusun melalui media pelaporan.

Capaian Kinerja Organisasi yaitu penyajian terkait pencapaian masing - masing indikator kinerja per sasaran strategis dengan rincian sebagai berikut:

C.1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dan 2023

Dari 2 Sasaran Strategis ditetapkan 7 Indikator Kinerja sebagai ukuran keberhasilan kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2023, Indikator Kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

- 1. Persentase Trayek Angkutan Darat Yang Tersedia
- 2. Jumlah Halte Sungai Yang Tersedia4) Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD
- 3. Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal
- 4. Kapasitas Ruas Jalan Yang Baik
- 5. Jumlah Sarana dan Prasarana Angkutan Darat dan Laut Yang Tersedia
- 6. Jumlah Kendaraan Yang Memenuhi Laik Angkutan Jalan
- 7. Angka Kecelakaan lalu Lintas Darat dan LautAngka Kecelakaan lalu Lintas Darat dan Laut



Tabel III. 3 HASIL PENGUKURAN KINERJA MELALUI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2021 s/d 2023 DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Formulasi	Realisasi		Tahun 2023			Sumber Data	KET
			2021	2022	Target	Realisasi	Capaian %		
1.1. Meningkatkan Aksebilitas Masyarakat Melalui Ketersediaan Sarana Dan Prasana Taransportasi Darat Dan Laut	1.1.1. Persentase Trayek Angkutan Darat Yang Tersedia	Rumus Indikator : <u>Jumlah Jaringan Trayek Yang Terseida x 100%</u> Jumlah Jaringan Trayek Yang Dibutuhkan	50%	0%	50%	0%	0%	Dishub	
	1.1.2. Jumlah Halte Sungai Yang Tersedia	Jumlah Halte Sungai Yang Sudah Dibangun	2 Unit	3 Unit	1 Unit	3 Unit	100%	Dishub	
	1.1.3. Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal pertahun	Jumlah orang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun	1.9230 Orang	291.098 Orang	194.000 Orang	215.696 Orang	111%	Dishub	
		Jumlah barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun	6.158 Ton	2.544 Ton	6.300 Ton	12422 Ton	197%	Dishub	
	1.1.4. Kapasitas Ruas Jalan Yang Baik	V/c	0,35 (A)	0,20 (A)	C	C (0,45)	100%	Dishub	
1.2. Meningkatkan Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Darat dan Laut	1.2.1. Jumlah Sarana dan Prasarana Angkutan Darat dan Laut Yang Tersedua	Jumlah Fasilitas Keselamatan/Rambu lalu Lintas Yang Terpasang Pada Titik Rawan Kecelakaan Tahun-n	17 Unit	8 Unit	40 unit	20 Unit	50%	Dishub	
	1.2.2. Jumlah Kendaraan Yang Memenuhi Laik Angkutan Jalan	Jumlah Kendaraan Yang Lulus Uji Elektronik	0 Unit	0 Unit	1180 Unit	1755 Unit	148%	Dishub	
	1.2.3. Angka Kecelakaan lalu Lintas Darat dan Laut	Jumlah Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Darat dan Laut	66 Kasus	65 Kasus	30 Kasus	20 Kasus	150%	Dishub	
PERSENTASE RATA RATA							107%		



Secara keseluruhan tingkat capaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dari rata – rata capaian 7 (tujuh) indikator kinerja sasaran tersebut dapat dinyatakan sangat baik dari target yang telah ditetapkan.

Uraian Pengukuran dan Analisis Kinerja Terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023 Perbandingan pada tahun sebelumnya :

1. SASARAN STRATEGIS 1

Sasaran 1 Dinas Perhubungan adalah Menguatnya Aksebilitas Masyarakat Melalui Ketersediaan Sarana dan Prasarana Transportasi Darat dan Laut. Sasaran 1 memiliki 4 indikator kinerja yang mendukung terlaksananya sasaran tersebut, yaitu :

a. Realisasi Capaian Target Kinerja (%)

1. Indikator 1 : Persentase Trayek Angkutan Darat Yang Tersedia

Indikator sasaran ini bertujuan sebagai upaya pemenuhan pelayanan publik menyangkut peningkatan ekonomi masyarakat, dan juga sebagai tolak ukur pencapaian misi RKPD Kab. Tanjung Jabung Barat untuk mengembangkan konektivitas antar pedesaan ke kota melalui lintasan darat sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan ekonomi di desa maupun kota. Pencapaian target ini didorong koordinasi yang baik antar Kab / Kota / KL dalam pengawasan Angkutan Umum, dan Angkutan Perintis.

Pada indikator ini pencapaian kinerja kinerja Tahun 2023 0% dengan target 50% tersedianya dokumen jaringan trayek angkutan penumpang. Pada tahun 2023 pencapaian target **Tidak Terealisasi**. Perbandingan antara realisasi di tahun 2022 **0%** dan realisasi di tahun 2023 **0%**.

Permasalahan dan Solusi

❖ Permasalahan

- Permasalahan angkutan umum di Kab. Tanjung Jabung Barat adalah armada yang kurang memadai, prasarana yang kurang mencukupi, minat pengguna angkutan umum yang rendah, serta peran regulator dan operator yang belum optimal. Hal ini terlihat dengan kondisi operasional yang kurang baik.
- Serapan kebutuhan anggaran untuk penyusunan dokumen jaringan trayek belum terpenuhi.



- Untuk mengakomodasi kebutuhan pengguna angkutan umum diperlukan perbaikan armada yang beroperasi, sistem pelayanan, serta manajemen operasional dan keuangan dengan mengintegrasikan semua kepentingan yang ada.

❖ Solusi

- Perlunya penanganan yang lebih intensif terkait pengelolaan angkutan umum sehingga lebih menarik peminat pengguna.
- Alokasi anggaran pada kegiatan penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas agar dapat direalisasikan tiap tahunnya.
- Pengembangan Jaringan Lalu Lintas perhubungan Darat perlu dilakukan penanganan secara menyeluruh karena permasalahan angkutan umum, baik penyebab maupun solusinya, terkait juga dengan bidang yang lain, dan
- pengembangan angkutan umum perlu diintegrasikan dengan sistem pembentuk kota

2. Indikator 2 : Jumlah Halte Sungai Yang Tersedia

Indikator sasaran ini bertujuan sebagai upaya pemenuhan pelayanan publik menyangkut kebutuhan sarana transportasi, dan juga sebagai tolak ukur pencapaian misi RKPD Kab. Tanjung Jabung Barat untuk mengembangkan konektivitas antar pedesaan ke kota sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan ekonomi di desa maupun kota.

Pada indikator ini pencapaian kinerja kinerja Tahun 2023 mencapai angka 100% atau realisasi 3 Unit halte sungai yang sudah tersusun dengan target 1 Unit .pada tahun 2023 pencapaian target sudah **sangat baik**. Perbandingan atara realisasi di tahun 2022 **100%** dan realisasi di tahun 2023 meningngkat target 1 unit dan realisasi 3 unit **150%**.

Permasalahan dan Solusi

❖ Permasalahan

- Realisasi capaian kinerja untuk indikator ini sudah sangat baik dan terdapat peningkatan setiap tahunnya, permasalahannya masih banyak target halte sungai jangka panjang yang belum terbangun secara menyeluruh sebagai penghubung dari desa ke desa sampai ke kota.
- Perlu menyusun proposal dan dokumen pendukung lainnya.



❖ Solusi

- Alokasi anggaran pada kegiatan pembangunan halte sungai agar dapat direalisasikan tiap tahunnya.
- Penyempurnaan penyediaan fasilitas perhubungan laut, sungai danau dan penyeberangan seperti halte sungai.
- Meningkatkan Pengendalian, Pengawasan terhadap layanan angkutan sungai, danau dan penyeberangan.

3. Indikator 3 : Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga/Terminal Tahun

Indikator sasaran ini bertujuan untuk mengukur ketepatan penyediaan sarana dan prasarana pendukung yang dirasakan oleh masyarakat sehingga terciptanya peningkatan aksesibilitas masyarakat.

Pada indikator ini pencapaian kinerja kinerja Tahun 2023 mencapai angka **diatas** 100% atau Realisasi 215.000 Orang dan 12.422 dengan target 194.000 Orang dan 6.300 ton Barang. pada tahun 2023 pencapaian target terbilang **sangat baik** dengan Perbandingan antara Realisasi tahun 2022 Persentase 105 % dan 152% dengan Persentase 111% dan 197%.

Permasalahan dan Solusi

❖ Permasalahan :

- Realisasi tergambar sangat baik hanya saja pengawasan dan penertiban keamanan kurang terpantau dikarenakan padatnya jumlah pengguna jasa transportasi, sehingga masih terdapat calo dan premanisme yang berkeliaran di area pelabuhan/terminal.
- Kurangnya partisipasi warga yang mengikuti mekanisme pelayanan kepelabuhan/ terminal.

❖ Solusi

- Pemenuhan sarana dan prasarana perhubungan
- Peningkatan SDM Aparatur melalui diklat dan pelatihan khusus
- Penegakan hukum dan melakukan operasi tertib pengawasan kepelabuhan/ terminal
- Memberikan sosialisasi yang berkaitan dengan SOP Kepelabuhan/terminal.



4. Indikator 4 : Kapasitas Ruas Jalan Yang Baik

Indikator sasaran ini bertujuan untuk mengukur kemampuan ruas jalan untuk melayani kebutuhan arus lalu lintas sesuai dengan fungsinya yang dapat diukur dan dibandingkan dengan standar tingkat pelayanan jalan. parameter karakteristik lalu lintas yaitu **kecepatan, kepadatan, dan volume**.

Formula Penghitungan = V/C Rasio di jalan Kabupaten x 100 %

$$= 681,1/1528,47 \times 100\%$$

$$= 0,45 = 45 \% \text{ (C) Arus lalu lintas stabil}$$

- *V/C Ratio adalah Perbandingan antara volume lalu lintas dengan kapasitas jalan*
- *= (Volume Lalu lintas Kendaraan di ruas Jalan Provinsi) / (Kapasitas Ruas Jalan Provinsi)*
- *Sesuai standar MKJI 1997 (manual kapasitas jalan Indonesia) dan PKJI (Pedoman Kapasitas Jalan Indonesia) 2014. Semakin tinggi kecepatan waktu tempuh menunjukkan semakin baik kinerja lalu lintas*

Pada indikator ini pencapaian kinerja kinerja Tahun 2023 mencapai angka **Baik**, atau realisasi ruas jalan kondisi baik (C) . dengan target nilai rasio (C). pada tahun 2023 pencapaian target terbilang **baik** dengan Perbandingan antara Realisasi tahun 2022 dengan angka 0,20 (A) dan Realisasi tahun 2023 dengan angka (C) / Arus lalu lintas stabil.

Permasalahan dan Solusi

❖ Permasalahan :

- Penyesuaian standar penyediaan jalan harus sesuai dengan fungsinya. Masih banyak terdapat jalan yang kesesuaian lebar jalan, tipe jalan, pemisah arah, hambatan samping (side friction) dan bahu jalan/kereb dan ukuran kota (city size) tidak sesuai standar dan fungsinya.
- Fungsi jalan tidak efektif dikarenakan Lebar rata-rata yang tersedia untuk pergerakan lalu lintas setelah pengurangan akibat parkir tepi jalan, atau penghalang sementara lain yang menutup jalur lalu lintas.



❖ Solusi

- Solusi yang diberikan yaitu berupa perbaikan kapasitas jalan.. dengan cara melakukan pelebaran geometrik jalan jika memungkinkan. Atau mengubah tipe jalan menjadi 2 jalur atau sebagainya.
- Melakukan penertiban angkutan kendaraan yang parkir di badan jalan dan pedagang kaki lima yang berjualan di sekitar bahu jalan

2. SASARAN STRATEGIS 1

Sasaran 2 Dinas Perhubungan adalah Meningkatnya Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Darat dan Laut. Sasaran 2 memiliki 3 indikator kinerja yang mendukung terlaksananya sasaran tersebut, yaitu :

1. Indikator 1 : Jumlah sarana dan prasarana angkutan darat dan laut yang tersedia.

Indikator sasaran ini bertujuan untuk upaya pemenuhan sarana keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta kemudahan pengguna jasa transportasi darat laut, sungai danau dan penyeberangan.

Pada indikator ini pencapaian kinerja tahun 2023 mencapai predikat **cukup baik**, karena jumlah ketersediaan prasarana yang diukur melalui penyediaan rambu rambu lalu lintas cukup memenuhi target yang di tentukan. Pada tahun 2022 realisasi mencapai angka 47% dengan target 35 unit. Perbandingan Realisasi penyediaan sarana dan prasarana transportasi pada tahun 2023 meningkat yaitu pada tahun 2023 **50%** dan di tahun 2022 **47%** .

Permasalahan dan Solusi

❖ Permasalahan :

- Masih minimnya sarana dan prasarana lalu lintas angkutan seperti rambu lalu lintas dan lainnya sebagai sarana prasarana perhubungan yang mendukung pelayanan terhadap pengguna jasa transportasi laut sungai dan penyeberangan. Sarana dan prasarana tentunya menjadi instrument penting menuju keselamatan transportasi.

❖ Solusi



- Pemenuhan sarana dan prasarana keselamatan lalu lintas angkutan jalan.
- Peningkatan SDM Aparatur melalui diklat dan pelatihan khusus
- Penagakan hukum dan melakukan operasi tertib lalu lintas rutin

2. Indikator 1 : Jumlah kendaraan yang memenuhi laik angkutan jalan

Indikator sasaran ini bertujuan sebagai upaya memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan di jalan. Mendukung terwujudnya kelestarian lingkungan dari kemungkinan pencemaran udara yang diakibatkan penggunaan kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan di jalan. Dan memberikan pelayanan umum kepada masyarakat. Serta untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis Dinas Perhubungan Kab. Tanjung Jabung Barat.

Pada indikator ini pencapaian kinerja di tahun 2023 mencapai predikat sangat **baik**. Jumlah kendaraan yang memenuhi standar laik uji adalah 1755 unit dengan target di tahun 2023 adalah 1180 unit dengan realisasi capaian (148%). Dan realisasi capaian di tahun 2022 adalah 0 Unit Perbandingan antara pencapaian kinerja di tahun 2022 dan tahun 2023 meningkat sebesar (148%).

Permasalahan dan Solusi

❖ Permasalahan :

- Capaian target sangat baik hanya saja kondisi gedung PKB masih kurang memadai perlu dilakukan rehab berat dan penyediaan kelengkapan alat uji kendaraan bermotor.

❖ Solusi

- Pemenuhan sarana dan prasarana Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor
- Peningkatan SDM Aparatur melalui diklat dan pelatihan khusus

3. Angka kecelakaan lalu lintas darat dan laut

Indikator sasaran ini bertujuan untuk mengukur tingkat kecelakaan pada suatu ruas jalan tertentu.

Pada indikator ini pencapaian kinerja kinerja Tahun 2023 mencapai angka 150% atau realisasi 20 Kasus dengan target 30 kasus. pada tahun 2023 pencapaian target terbilang sangat **baik** karena perbandingan



persentase meningkat dan menunjukkan kasus yang terjadi lebih rendah dari prediksi target yang ditentukan. Dinas Perhubungan Kab. Tanjung Jabung Barat. Perbandingan antara realisasi di tahun 2022 **65 Kasus** dan realisasi di tahun 2023 **20 Kasus**.

Permasalahan dan Solusi

❖ Permasalahan :

- Masih minimnya sarana dan prasarana lalu lintas angkutan seperti marka, rambu lalu lintas, halte, traffic light dan lainnya merupakan sarana prasarana perhubungan yang mendukung pelayanan terhadap pengguna jasa transportasi. Sarana dan prasarana tentunya menjadi instrument penting menuju keselamatan lalu lintas.
- Kurangnya partisipasi warga kabupaten untuk memahami dan mematuhi aturan lalu lintas

❖ Solusi

- Pemenuhan sarana dan prasarana perhubungan
- Peningkatan SDM Aparatur melalui diklat dan pelatihan khusus
- Penagakan hukum dan melakukan operasi tertib lalu lintas
- Memberikan sosialisasi yang berkaitan dengan keselamatan lalu lintas

Dalam terwujudnya pengukuran capaian sasaran strategis dan indikator kinerja utama di Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai dengan cascading yang memiliki tujuan Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah (rasio konektivitas). Dimana untuk variabel yang mempengaruhi Rasio Konektivitas Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu angkutan jalan, dan ASDP (angkutan sungai, danau dan Penyeberangan) yang mana angkutan tersebut membantu dalam menghubungkan antar wilayah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Berikut merupakan formulasinya :

Rasio konektivitas Kabupaten

Berdasarkan Permendagri 18 Tahun 2020

Rasio konektivitas Provinsi = $(IK1 \times \text{bobot angkutan jalan}) + (IK2 \times \text{Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan})$

1. $IK1 (\text{angkutan jalan}) = \frac{(\text{Jumlah trayek yg dilayani pd provinsi} \times \text{bobot trayek})}{\text{dibagi jumlah kebutuhan trayek pada provinsi tersebut}}.$
2. $IK2 (\text{Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan}) = \frac{\text{jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi pd provinsi tsb} \times \text{bobot lintas}}{\text{dibagi (jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada provinsi tersebut)}}$



Rasio Konektifitas Kabupaten = $(Ik1 \times \text{Bobot Angkutan Jalan}) + Ik2 \times (\text{Bobot angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan})$

Keterangan :

$Ik1 = \text{Angkutan Jalan (Jumlah Trayek yang dilayani dalam Kabupaten x Jumlah kebutuhan trayek) / Jumlah Kebutuhan Trayek pada Kabupaten Tersebut.}$

$Ik2 = \text{Angkutan Penyeberangan (Jumlah Lintas laut atau Penyeberangan x bobot Lintas) / Bobot Kebutuhan Lintas Sungai Laut dan Penyeberangan.}$

PERHITUNGAN dan DATA

A. IK1 Angktan Jalan

1. Trayek yang dilayani

PERINTIS

- Senyerang – Teluk Nilau – Kuala Tungkal (pp)

Jumlah Trayek yang telah dilayani sebanyak 1 trayek

2. Jumlah Kebutuhan Trayek

AKAP (Antar Kota Antar Provnsi)

- Kuala Tungkal – Padang via Jambi- Muaro Bungo (pp)

- Kuala Tungkal – Palembang via Jambi (pp)

- Kuala Tungkal – Jakarta

- Kuala Tungkal – Lampung (pp) via Kota Jambi

- Kuala Tungkal – Bengkulu (pp) via Kota Jambi

- Kuala Tungkal – Pekanbaru

- Kuala Tungkal – Medan

Jumlah Trayek yang telah dilayani sebanyak 5 trayek

Total jumlah trayek angkutan jalan yang dilayani sebanyak 6 Trayek

- Bobot Trayek

5 kali dalam seminggu = 1

B. IK2 Angkutan Penyeberangan

a. Lintas Penyeberangan Perintis

Dabo Singkep – Kuala Tungkal (pp)

b. Lintas Komersil

Batam – Kuala Tungkal (pp)

c. Lintas Penyeberangan Halte Sungai

Jumlah Halte Yang Dibangun Pada Tahun 2023 adalah 2 Unit



- Desa Lumahan Kecamatan Senyerang
- Dusun Tanjung Mawar Desa Kayu Aro Kecamatan Senyerang
- Total lintas yang beroperasi adalah sebanyak **4 Lintasan**
- Bobot Trayek = lintas penyeberangan lebih besar dari pada lintas darat = 1 Perhitungan (>5 Kali seminggu)

Rasio Konektifitas : $lk1 (10 \times 1) / 12 = 0,8$

$$lk2 (4 \times 1) / 12 = 0,3$$

= $(lk1 \times \text{Bobot angkutan jalan}) + (lk2 \times \text{Bobot angkutan sungai dan penyeberangan})$

$$= (0,8 \times 70) + (0,3 \times 70)$$

$$= 56 + 21 = 77\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan diatas dapat disimpulkan bahwa Indeks Konektivitas Kabupaten Tanjung Jabung Barat melalui pengukuran trayek angkutan jalan dan lintasan angkutan sungai dan penyeberangan telah mencapai angka **Baik** dengan nilai indeks rasio **77%** Trayek yang sudah terjadi. Hal ini tentu didukung dengan pengembangan jaringan trayek angkutan jalan dan Lintas angkuta sungai dan penyeberangan melalui ketersediaan halte sungai sebagai penghubung lintasan antar daerah dari desa ke kota.

LKJIP (TAHUN 2023)



TABEL III. 4 HASIL PENGUKURAN KINERJA MELALUI CAPAIAN PROGRAM KEGIATAN
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Urusan Pemerintan	Kebijakan	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target		Realisasi			Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut OPD
				Target	Rp	Target	Rp	%			
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Perbub nomor 23 tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Program Penunjang Urusan Pemereintah Daerah Kab/Kota		12 Bulan	Rp 5.608.532.212	12 Bulan	Rp 5.285.855.134	94,2%	Tidak Ada Masalah	-	-
		Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Tersedia	6 Dok	Rp 14.900.000	6 Dok	Rp 13.100.000	87,9%	Tidak Ada Masalah	-	-
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realiasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Yang Disusun	6 Dok	Rp 14.900.000	6 Dok	Rp 13.100.000	87,9%	Efisiensi belanja yang merupakan sisa belanja Belanja cetak atau fotocopy dokumen dokumen perencanaan untuk tahun 2023.	Akan di akomodir kembali sesuai aturan	-

LKJIP (TAHUN 2023)

 DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan OPD	12 BuLan	Rp 3.658.301.462	12 BuLan	Rp 3.415.479.006	93,4%	Tidak Ada Masalah	-	-
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Dibayarkan Gaji dan Tunjangan ASN	12 BuLan	Rp 3.481.171.462	12 BuLan	Rp 3.248.323.228	93,3%	Tidak Ada Masalah	-	-
		Penyedia Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan honorarium	1 Dok	Rp 176.130.000	1 Dok	Rp 166.155.778	94,3%	Tidak Ada Masalah	-	-
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Yang Disusun	1 Dok	Rp 1.000.000	1 Dok	Rp 1.000.000	100,0%	Tidak Ada Masalah	-	-
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah DOKumen Kartu Inventaris	8 Dok	Rp 68.000.000	8 Dok	Rp 52.818.150	77,7%	Tidak Ada Masalah	-	-

LKJIP (TAHUN 2023)

 DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Barang Milik Daerah OPD Yang Diamankan	8 Dok	Rp 68.000.000	8 Dok	Rp 52.818.150	77,7%	Sisa anggaran sebesar Rp. 15,181,850 merupakan Efisiensi belanja yang merupakan sisa belanja asuransi kendaraan 2023.	Akan di akomodir kembali sesuai aturan	-
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	130 Stel	Rp 68.800.000	130 Stel	Rp 68.800.000	100,0%	Tidak Ada Masalah	-	-
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Yang Tersedia Beserta Perlengkapannya	130 Stel	Rp 68.800.000	130 Stel	Rp 68.800.000	100,0%	Pada Subkegiatan ini diperlukan Pagu Anggaran tambahan untuk meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran dan kedisiplinan.	Penambahan Anggaran Belanja	-

LKJIP (TAHUN 2023)

 DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	Rp 461.192.150	12 Bulan	Rp 459.445.217	99,6%	Tidak Ada Masalah	-	-
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Penerangan Kantor	12 Bulan	Rp 11.108.000	12 Bulan	Rp 11.108.000	100,0%	Tidak Ada Masalah	-	-
		Pengadaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 Paket	Rp 65.923.000	3 Paket	Rp 65.840.000	99,9%	Pada Subkegiatan ini sangat diperlukan Pagu Anggaran tambahan untuk ketersediaan sarana dan prasarana penunjang layanan administrasi perkantoran	Penambahan Anggaran Belanja	-
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor	1404 Kotak	Rp 30.000.000	1000 Kotak	Rp 30.000.000	100,0%	Tidak Ada Masalah	-	-

LKJIP (TAHUN 2023)

 DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak (Blangko atau Formulir dan Penggandaan)	12 Bulan	Rp 19.320.000	12 Bulan	Rp 19.100.000	98,9%	Tidak Ada Masalah	-	-
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	1500 Eksem pler	Rp 6.600.000	1500 Eksem pler	Rp 5.200.000	78,8%	Tidak Ada Masalah	-	-
		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi	12 Bulan	Rp 328.241.150	12 Bulan	Rp 328.197.217	100,0%	Pada Subkegiatan ini sangat diperlukan Pagu Anggaran tambahan mengingat banyaknya Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang tidak dapat dilaksanakan berkaitan dengan urusan perhubungan	Penambahan Anggaran Belanja	-

LKJIP (TAHUN 2023)

 DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah OPD Yang Tersedia	12 Unit	Rp 734.942.000	12 Unit	Rp 732.466.800	99,7%	Tidak Ada Masalah		-
		Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan atau mesin lainnya	12 Unit	Rp 734.942.000	12 Unit	Rp 732.466.800	99,7%	Pada Subkegiatan ini sangat diperlukan Pagu Anggaran tambahan mengingat banyaknya kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran yang belum terpenuhi	Penambahan Anggaran Belanja	-
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	Rp 127.087.600	12 Bulan	Rp 126.628.202	99,6%	Tidak Ada Masalah	-	-

LKJIP (TAHUN 2023)

 DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Surat Keluar Yang Terkelola	12 Bulan	Rp 1.420.000	12 Bulan	Rp 1.400.000	98,6%	Tidak Ada Masalah	-	-
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Hitungan Beban Telepon/ Air / Listrik yang terpakai/dibayarkan	12 Bulan	Rp 102.995.600	12 Bulan	Rp 102.976.202	100,0%	Tidak Ada Masalah	-	-
		Pelayanan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Layanan Jasa Umum Kantor	12 Bulan	Rp 22.672.000	12 Bulan	Rp 22.252.000	98,1%	Tidak Ada Masalah	-	-
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Bangunan/Kendaraan Kantor Kondisi Baik	96 Unit	Rp 475.309.000	96 Unit	Rp 417.117.759	87,8%	Tidak Ada Masalah	-	-

LKJIP (TAHUN 2023)

 DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Terpelihara	54 Unit	Rp 426.709.000	54 Unit	Rp 368.629.259	86,4%	Sisa anggaran sebesar Rp. 417,117,749 merupakan Merupakan efisiensi dari Belanja Bahan Bahan Bakar dan Pelumas dikarenakan terdapat kerusakan pada salah satu kendaran dinas operasional lapangan.	Akan di akomodir kembali sesuai aturan	-
		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	42 Unit	Rp 48.600.000	42 Unit	Rp 48.488.500	99,8%	Tidak Ada Masalah	-	-

LKJIP (TAHUN 2023)

 DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

Peningkatan aktivitas/konektivitas perekonomian yang merata dari desa sampai kota yang lebih ditopang dari sektor ekonomi kerakyatan dan Pembangunan kabupaten yang berkelanjutan		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Tingkat Tertib Lalu Lintas Angkutan Jalan	100%	Rp 1.174.968.000	100%	Rp 1.153.312.430	98,2%	Tidak Ada Masalah	-	-
	PERMENHUB NO. 19 TAHUN 2021, BN 2021 / NO. 531, 57 HLM	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	8 Paket	Rp 272.200.000	8 Paket	Rp 258.872.430	95,1%	Tidak Ada Masalah	-	-

LKJIP (TAHUN 2023)



DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Yang Tersedia	1 Paket	Rp 236.200.000	1 Paket	Rp 222.928.848	94,4%	Tidak Ada Masalah	-	-
		Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	6 Paket	Rp 6.000.000	6 Paket	Rp 6.000.000	100,0%	Tidak Ada Masalah	-	-
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Yang Tersedia	1 Paket	Rp 30.000.000	1 Paket	Rp 29.943.582	99,8%	Tidak Ada Masalah	-	-
	UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Angkutan Jalan	Pelaksanaan manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jarngan Jalan	Persentase Pelaksanaan manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jarngan Jalan	100%	Rp 726.380.000	100%	Rp 718.720.000	98,9%	Tidak Ada Masalah	-	-

LKJIP (TAHUN 2023)

 DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

		Pengawasan dan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Operasi Pengawasan dan Pengendalian	36 Kali	Rp 726.380.000	36 Kali	Rp 718.720.000	98,9%	Tidak Ada Masalah	-	-
	PP Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan	Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	6 Operasi	Rp 146.388.000	6 Operasi	Rp 145.720.000	99,5%	Tidak Ada Masalah	-	-

LKJIP (TAHUN 2023)



DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

		Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota Dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Yang Dilaksanakan	6 Operasi	Rp 146.388.000	6 Operasi	Rp 145.720.000	99,5%	Tidak Ada Masalah	-	-
		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	1 Paket	Rp 30.000.000	1 Paket	Rp 30.000.000	100,0%	Tidak Ada Masalah	-	-

LKJIP (TAHUN 2023)

		Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	1 Paket	Rp 30.000.000	1 Paket	Rp 30.000.000	100,0%	Pada Subkegiatan ini sangat diperlukan Pagu Anggaran tambahan untuk mendukung tertib keselamatan pengguna angkutan dan mengurangi angka kecelakaan lalu lintas	Penambahan Anggaran Belanja	-
Peningkatan aktivitas perekonomian yang merata dari desa sampai kota		Program Pengelolaan Pelayaran	Tingkat Pemenuhan Pengelolaan Pelayaran	100%	Rp 1.512.100.000	100%	Rp 1.495.520.400	98,9%	Tidak Ada Masalah	-	-

LKJIP (TAHUN 2023)

 DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

yang lebih ditopang dari sektor ekonomi kerakyatan dan Pembangunan kabupaten yang berkelanjutan	PP Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Penyelenggar aan Bidang Pelayaran	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah kabupaten/Kota Yang Terletak Pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api kabupaten/Kota	Persentase Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah kabupaten/Kota Yang Terletak Pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api kabupaten/Kota	12 Bulan	Rp 1.185.100.000	12 Bulan	Rp 1.169.217.250	98,7%	Tidak Ada Masalah	-	-
---	---	--	--	-------------	------------------	-------------	------------------	-------	----------------------	---	---

LKJIP (TAHUN 2023)



DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

		Pengendalian dan pengawasan jaringan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal dalam daerah kabupaten/kota yang terletak pada jaringan jalan kabupaten/kota dan/atau jaringan jalur kereta api kabupaten/kota dalam daerah kabupaten/kota	Meningkatnya Ketertiban angkutan di kawasan pelabuhan laut & sungai	12 Bulan	Rp 1.185.100.000	12 Bulan	Rp 1.169.217.250	98,7%	Tidak Ada Masalah	-	-
	PP Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Halte Sungai dalam kondisi baik	2 Unit	Rp 327.000.000	2 Unit	Rp 326.303.150	99,8%	Tidak Ada Masalah	-	-

LKJIP (TAHUN 2023)

 DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

		Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dalam kondisi baik	1 Unit	Rp 109.000.000	1 Unit	Rp 108.641.100	99,7%	Pada Subkegiatan ini sangat diperlukan Pagu Anggaran tambahan untuk mendukung pengembangan pelabuhan RORO Kuala Tungkal mengingat meningkatnya minat pengguna jasa kepelabuhan	Penambahan Anggaran Belanja	-
		Pemeliharaan Dermaga Sngai	Jumlah Halte Sungai dalam kondisi baik	1 Unit	Rp 218.000.000	1 Unit	Rp 217.662.050	99,8%	Pada Subkegiatan ini sangat diperlukan Pagu Anggaran tambahan untuk menjaga prasarana laut kondisi baik yang menjadi penghubung antar desa ke kota	Penambahan Anggaran Belanja	-
Jumla Total					Rp 8.295.600.212		Rp 7.934.687.964	98%			



Dinas Perhubungan dalam pelaksanaan tugas / kegiatan sekarang ini berpedoman kepada Tugas Pokok dan Fungsi yang menjadi wewenang atau yang telah diamanahkan / digariskan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sebagai suatu instansi yang bertugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang Perhubungan, maka Dinas Perhubungan berusaha semaksimal mungkin dalam memberikan Pelayanan atau Pembinaan kepada masyarakat dan meningkatkan kualitas Aparatur serta mendorong terwujudnya capaian kinerja dengan melaksanakan program-program dan kegiatan yang lebih terarah, berdasarkan Renstra 2021 - 2026 dan mengaplikasikannya kepada kegiatan-kegiatan tahunan.

Bila dilihat dari segi pendanaan, dalam tahun 2023 nilai capaian kinerja Dinas Perhubungan dengan total pagu dana Rp.8.290.200.212,- pada APBD Perubahan, terealisasi sebesar Rp. 7.934.437.954,-, (95,71%) , dengan rincian sebagai berikut:

- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dengan Pagu Anggaran Sebesar Rp. 5,603,132,212,- Terealisasi sebesar Rp. 5,285,775,124 dengan persentase (94.34%).
- Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) Dengan Pagu Anggaran Sebesar Rp. 1,174,968,000,- Terealisasi sebesar Rp. 1,153,142,430,- dengan persentase (98,14%)
- Program Pengelolaan Pelayaran Dengan Pagu Anggaran Sebesar Rp. 1,512,100,000,- Terealisasi Sebesar Rp. 1,495,520,400,- dengan persentase (98,9%)

Dari seluruh sub kegiatan yang dilaksanakan terdapat 8 sub kegiatan yang realisasinya dibawah 90 % yaitu:

1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.14.900.000,- terealisasi sebesar Rp. 13.100.000 (87,92%). Sisa anggaran sebesar Rp. 1.800.000,- merupakan Efisiensi belanja yang merupakan sisa belanja Belanja cetak atau fotocopy dokumen dokumen perencanaan untuk tahun 2023.

2. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 68.000.000, terealisasi sebesar Rp. 52,818,150 (77,67%). Sisa anggaran sebesar Rp.



15,181,850 merupakan Efisiensi belanja yang merupakan sisa belanja asuransi kendaraan 2023.

3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 469,909,000, terealisasi sebesar Rp. 417,117,749 (88,77%). Sisa anggaran sebesar Rp. 417,117,749 merupakan Merupakan efisiensi dari Belanja Bahan Bakar dan Pelumas dikarenakan terdapat kerusakan pada salah satu kendaraan dinas operasional lapangan.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa Kinerja Dinas Perhubungan dapat dikategorikan sangat baik namun perlu mendapatkan perhatian yang serius untuk masa yang akan datang dalam penyempurnaan- penyempurnaan Kinerja Dinas untuk itu perlu pengembangan dan peningkatan Sumber Daya Manusia maupun pemenuhan kelengkapan sarana dan prasarana penunjang.

C. Analisis Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan yang menunjang Pencapaian target kinerja

Secara Umum Program dan Kegiatan yang ada di Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sudah berlandaskan kepada perencanaan kinerja yang sudah ditetapkan pada RPJMD, maupun Renstra Dinas Perhubungan, yang pada dasarnya sudah menunjang tujuan dan sasaran strategis yang sudah ditetapkan.

Program dan Kegiatan yang dilakukan Dinas Perhubungan dalam rangka menunjang pencapaian kinerja seperti yang sudah dijelaskan pada BAB II poin C.1 diatas, dapat disimpulkan yaitu upaya yang dilakukan adalah terkait Konektivitas dan terkait Keselamatan, antara lain:

1. Terkait Konektivitas

1. Meningkatkan Prasarana Perhubungan

- a) Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
 - Menyediakan Fasilitas Keselamatan Rambu Darat pada Ruas Jalan Rawan Kecelakaan
 - Meningkatkan Pembangunan Halte Sungai Antar Desa Terpencil



2. Meningkatkan Angkutan Yang Sesuai Standar

- Melakukan Pengawasan serta survey pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) kapal penyeberangan berdasarkan PM 62 tahun 2019 tentang standar minimal angkutan penyeberangan
- Melakukan Pemeriksaan Kendaraan laik jalan terhadap angkutan yang beroperasi

3. Meningkatkan Akses Transportasi di Daerah Terpencil Melaksanakan pengawasan dan pembinaan Angkutan Perintis (DAMRI) dan Kapal Perintis di pelabuhan – pelabuhan pengumpan

4. Mengoptimalisasi trayek angkutan umum

- Pelaksanaan Survey Load Faktor Angkutan Umum, yang hasilnya dapat digunakan untuk penghitungan kebutuhan armada angkutan umum, mengetahui data – data perizinan angkutan umum, dan untuk mengetahui angkutan yang melakukan penyimpangan trayek.

5. Meningkatkan Kualitas SDM Dalam Pelayanan Jasa Transportasi

2. Terkait Keselamatan

1. Meningkatkan Pemahaman Masyarakat / stakeholder tentang aturan lalu lintas

- Melaksanakan Rapat Koordinasi FLLAJ Prov. Sumbar dengan semua pihak terkait sebanyak 1 kali, serta adanya tindak lanjut yang dilakukan berdasarkan hasil rapat Forum LLAJ yang dilakukan, seperti adanya Pemilihan Pelajar Pelopor sebagai salah satu tindak lanjut hasil rapat Forum LLAJ untuk tahun 2024.

- Melakukan Sosialisasi keselamatan LLAJ pada Event 17 Agustus 2023

2. Meningkatkan moda transportasi dalam kondisi baik

- Melakukan pemeriksaan laik jalan kendaraan (Rampcheck)

3. Meningkatkan Kualitas petugas Lalu Lintas Upaya dalam meningkatkan volume penugasan dilapangan adalah:

- Pelaksanaan kegiatan Satuan Tugas Pengawasan Kendaraan Bermotor di Jalan (Patroli Rutinan) pada ruas jalan yang sering menimbulkan kemacetan dan kepadatan kendaraan.
- pelaksanaan Car Free Dat (CFD)
- Pengaman Pada peringatan hari – hari besar nasional dan daerah
- Pelaksanaan Razia Gabungan Bersama Stakeholder Terkait (PM, Satlantas, DII)

LKJIP (TAHUN 2023)



DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

Dari hasil analisa terhadap program / kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja, dapat ditarik kesimpulan:

1. Konsistennya Perencanaan dengan proses pelaksanaan kegiatan
2. Adanya perencanaan yang matang didalam menyusun suatu program/kegiatan yang terkait dengan pencapaian kinerja Dinas Perhubungan.
3. Penetapan indikator kinerja yang tepat, terukur dan dapat dicapai.
4. Pengawasan dan evaluasi terhadap semua kegiatan, terutama yang rutin dilaksanakan setiap tahun.
5. Koordinasi yang intens baik internal maupun eksternal.



BAB IV PENUTUP

Dengan selesainya Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Tahun 2023, yang disusun dalam rangka perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan atas pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan dan Penetapan Kinerja sebagai tanda suatu kesanggupan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan dalam satu tahun. Secara umum kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 dapat dikategorikan sangat **Baik** dengan nilai rata – rata capaian indikator kinerja sasaran yaitu **107%**. Berdasarkan uraian dan analisis kinerja dari belanja langsung sebagaimana diungkapkan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa capaian Kinerja Dinas Perhubungan telah terealisasi fisiknya mencapai 100 % dan akuntabilitas keuangan mencapai 98%, namun perlu mendapatkan perhatian yang serius untuk masa yang akan datang dalam penyempurnaan - penyempurnaan Kinerja Dinas Perhubungan, khususnya Pengembangan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia maupun pemenuhan kelengkapan sarana dan prasarana penunjang. Terhadap kondisi tersebut, strategi di masa mendatang yang perlu dikembangkan adalah:

1. Mengoptimalkan perencanaan pembangunan dengan senantiasa mendasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) / Renstra yang telah disusun dan disepakati bersama.
2. Meningkatkan responsibilitas aparatur terhadap segala permasalahan yang timbul, sehingga ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintahan dapat ditekan/ menurun.
3. Meningkatkan pengawasan dan evaluasi di tingkat manajerial, guna pencapaian kinerja yang lebih baik.
4. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Aparatur untuk menunjang pencapaian target kinerja dinas secara maksimal.

Penyusunan LAKIP 2023 masih terdapat beberapa kendala yang perlu menjadi komitmen bersama, untuk perbaiki dan penyempurnaan LAKIP:

1. Mewujudkan dokumen perencanaan kinerja yang didukung dengan target-target indikator kinerja (input, output, outcome) yang terukur.
2. Mewujudkan Sistem Manajemen Kinerja yang komprehensif dan transparan di masing-masing unit kerja dengan mengacu pada perkembangan data Indikator Kinerja Utama.

LKJIP (TAHUN 2023)

 DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

- 3. Indikator Kinerja Utama betul – betul diaplikasikan sebagai alat evaluasi kinerja untuk melihat keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai program-program pemerintahan dan pembangunan.
- 4. Agar setiap Unit Kerja membangun data kinerja yang digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang telah berjalan.
- 5. Masing-masing Unit Kerja dapat melakukan analisis efisiensi dan efektivitas dengan didasarkan pada capaian indikator kinerja input, output dan outcome.

Kuala Tungkal, 24 Februari 2024

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**



SYAMSUL JUMHARI, S.Sos

Pembina Muda

NIP. 19701223 199203 1 001



LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Prof. Dr. Sri Soedewi MS Telp. (0742) 7351069
KUALA TUNGKAL

As. 269

AB'167

A2 334.

NOTA DINAS

Kepada Yth : Bapak Bupati Tanjung Jabung Barat
Melalui : Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Dari : Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Nomor : 500.11 / 084 / Dishub / 2024
Tanggal : 22 Januari 2024
Perihal : Permohonan Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka diminta kepada setiap OPD agar segera menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Berkenaan hal tersebut diatas, kami mohon perkenan Bapak untuk menandatangani Perjanjian Kinerja atas nama tersebut dibawah ini, yaitu :

Nama : **SYAMSUL JUHARI, S.Sos**
Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda, IV/c
Nip : 19701223 199203 1 001
Jabatan : Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



SYAMSUL JUHARI, S.Sos

Pembina Utama Muda

NIP. 19701223 199203 1 001

sdh. Sekda
Prinsip
a/kas
13/1-24
a

Disampaikan ke
Bupati
31/1/24

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SYAMSUL JUHARI, S.Sos
Jabatan : Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Drs. H. ANWAR SADAT, M.Ag
Jabatan : Bupati Tanjung Jabung Barat
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Drs. H. ANWAR SADAT, M.Ag

Kuala Tungkal, 2024

Pihak Pertama,

SYAMSUL JUHARI, S.Sos

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2023
1.1. Meningkatnya Akseibilitas Masyarakat Melalui Ketersediaan Sarana Dan Prasana Taransportasi Darat Dan Laut	1.1.1. Persentase Trayek Angkutan Darat Yang Tersedia	55%
	1.1.2. Jumlah Halte Sungai Yang Tersedia	1 Unit
	1.1.3. Persentase Armada Angkutan Darat dan Laut Yang Tersedia	55%
	1.1.4. Kapasitas Ruas Jalan Yang Baik	A
1.2. Meningkatnya Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Darat dan Laut	1.2.1. Jumlah Sarana dan Prasarana Angkutan Darat dan Laut Yang Tersedia	45 Unit
	1.2.2. Jumlah Kendaraan Yang Memenuhi Laik Angkutan Jalan	1210 Unit
	1.2.3. Prediksi Menurunnya Jumlah Angka Kecelakaan Darat dan Laut	20 Kasus

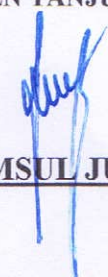
No	Program	Anggaran	Ket
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 4,620,221,223,-	APBD
2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan	Rp. 1,201,917,973,-	APBD
3	Program Pengelolaan Pelayaran	Rp. 4,302,250,000,-	APBD
Jumlah		Rp. 10,124,389,196,-	APBD

Kuala Tungkal, 2024

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

**DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**


Drs. H. ANWAR SADAT, M.Ag


SYAMSUL JUHARI, S.Sos